

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)

Sagita Feby Riskina Haloho^{1)*}

¹⁾Universitas Buddhi Dharma
Jalan Imam Bonjol No 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾sagitalhaloho99@gmail.com

Rekam jejak artikel:

Terima 30 Oktober 2021;
Perbaikan 30 Oktober 2021;
Diterima 5 Desember 2021;
Tersedia online 15 Desember 2021

Kata kunci: {gunakan 4-6 kata kunci}

Institusional Ownership
Managerial Ownership
Independent Commissioner
Leverage
Tax Avoidance

Abstrak

This study aims to determine the effect of Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioner and Leverage on Tax Avoidance. The object chosen in this study is the Mining Company Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2019.

This type of research is quantitative research, using a population of 10 companies from 47 companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the Mining sector. The sampling method in this study is purposive sampling, based on the selected criteria, the number of samples used is 40 samples as observations. The data source used is secondary data obtained from www.idx.co.id to obtain data in the form of financial reports from each company which is then processed using SPSS version 26.

The results of the study partially show that the first variable of institutional ownership does not have a significant on tax avoidance with a value of sig. 0.095 < 0.05, the second variable managerial ownership has an negative significant effect on tax avoidance with a sig value. 0.028 > 0.05, the third variable independent commissioner does not have a significant on tax avoidance with a value of sig. 0.346 < 0.05 and the fourthvariable leverage has an significant effect on tax avoidance with a value of sig. 0,007 < 0,05 in Mining Companiess listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2019.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat menurut undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana sudah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum & tatacara perpajakan (UU KUP). Pengertian tersebut menurut pemahaman bahwa pajak mempunyai sifat yang memaksa. Wajib pajak memiliki kewajiban akan membayar pajak yang besarnya dihitung menurut dari keuntungan (laba) yang diperolehnya. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling berpotensi dan menempati persentase tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Seperti yang tercantum pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020, Berdasarkan nilai Rp 2.233,2 Penerimaan pendapatan negara Dan sebanyak Rp 1.865,7 triliun Berdasarkan dari penerimaan pajak, mengingat betapa besarnya penerimaan berdasarkan sektor pajak, maka pemerintah Indonesia wajib mempertinggi atau memaksimalkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atau sektor pajak.

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, Dari salah satu pihak yang menaruh partisipasi besar merupakan perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor perpajakan bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dipercaya

sebagai beban. Ini mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara otorisasi pajak dengan perusahaan dimana otorisasi pajak sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan yang menjadi agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Hal ini menciptakan wajib pajak berupaya keras agar menyesuaikan besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, salah satu penyebab wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya ditentukan sifat pajak yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada ada wajib pajak. sehingga adanya hasrat perusahaan untuk mengefisienkan beban pajaknya agar bisa memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara otorisasi pajak dan perusahaan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun ilegal. usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan upaya pengurangan Pembayaran pajak secara ilegal disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*). (Aprianto & Dwimulyani, 2019) Salah satu fenomena yang terjadi pada Indonesia dapat dicermati menurut tahun 2003 total uang aliran gelap atau ilegal dari Indonesia ke luar negeri diperkirakan mencapai Rp141,82 triliun, meningkat menjadi Rp227,75 triliun pada tahun 2014. Khususnya pada sektor pertambangan (Migas, mineral dan batubara / bahan galian), kenaikan aliran uang ilegal yang sangat fantastis, kurun dari 2003 sampai 2014 mencapai 102,403% atau rata-rata per tahun terjadi kenaikan sebanyak 8,53%. tahun 2003 total aliran uang ilegal pada sektor pertambangan diperkirakan mencapai Rp 11,80 Triliun, sedangkan tahun 2014 naik mencapai Rp 23,809 triliun.

Menurut penelitian kebijakan ekonomi dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Nico Saputra mengatakan bahwa uang ilegal di sektor pertambangan dikarenakan adanya transaksi perdagangan faktur palsu (*trade mis-invoicing*) ini berkembangnya tambang ilegal yang berpotensi (Illegal mining) dan terjadi ekspor komoditi pertambangan yang tidak tercapai atau terdaftar. Hal lainnya, Besarnya jumlah aliran keluar ilegal di sektor pertambangan juga dapat disebabkan oleh tingginya Indikasi terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan pada Indonesia. KPK masih banyak perusahaan pertambangan di Indonesia yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Data hasil Koordinasi dan Supervisi KPK dengan Kementerian ESDM dan instansi terkait, dari 7.834 perusahaan yang di data oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebesar 24 persen tidak memiliki NPWP, serta sekitar 35 persen yang tidak melaporkan SPT. (Laban Laisila)

Salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan secara legal dan aman adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak direncanakan dalam bentuk proyek pajak tetapi masih termasuk dalam kategori penghindaran pajak titik peraturan perpajakan untuk menjaga beban pajak serendah mungkin. Harcriswono dalam (Budianti & Curry, 2018).

Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kekurangan peraturan perundang-undangan perpajakan (*gray area*) untuk mengurangi utang pajak. Undang-undang penghindaran pajak tidak memiliki unsur pidana Karena perusahaan menjalankan usahanya dengan baik dan benar dengan bukti yang benar dan akurat tidak melanggar hukum, tetapi negara tidak memperoleh pajak secara maksimal akibat dari aktivitas tersebut.

Corporate governance menurut Indonesian Institute for corporate governance adalah suatu struktur, sistem dan proses organisasi perusahaan untuk memberikan nilai tambah dalam jangka waktu yang lama. Diukur dari kemampuan penghindaran pajak perusahaan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan konsep *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah sistem untuk pengolahan dan pengendalian sebuah perusahaan. kerangka corporate governance menjelaskan Bagaimana merumuskan dan menerapkan aturan dan prosedur pengambilan keputusan politik untuk sepenuhnya mempertimbangkan dan melaksanakan tujuan perusahaan dan memantau kinerja perusahaan. (SumiHANDAYANI, 2013 dalam (Kartana & Wulandari, 2018). Mekanisme Good Corporate Governance (CCG) Meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan institusional memainkan peranan penting dalam kontrol, disiplin dan pengaruh manajer. mereka percaya bahwa, berdasarkan pada ukuran dan jumlah hak suara, pemilik institusional dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri atau egois. sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan pemilik institusional harus membeli insentif kepada Manajemen perusahaan untuk membuat keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan dari pemegang, menurut shleifer dan Vishny 1998 dalam (Mulyani et al., 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Pramuka, 2018) dan (Mulyani et al., 2018) Menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen diukur dengan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan internal perusahaan. Arifan, 2012 (Prasetyo & Pramuka, 2018) menegaskan bahwa Kepemilikan saham manajerial diukur dengan persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direksi dan karyawan. semakin tinggi proporsi manajer perusahaan semakin aktif manajer untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham, karena jika keputusannya

salah yang diambil maka manajer harus menanggung konsekuensinya. Pada penelitian yang dilakukan (Putri & Lawita, 2019) Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Krisna, 2019) dan penelitian (Prasetyo & Pramuka, 2018) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Peran dewan komisaris independen adalah untuk mengawasi pekerjaan Dewan direksi yang dipimpin oleh chief executive office. Oleh karena itu, diperlukan komisaris independen (Independent commissioner) sebagai pengawas. Menurut Wardhani 2006, Dengan adanya komisaris independen di perusahaan juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan perusahaan dan merumuskan strategi bisnis terbaik, termasuk menetapkan kebijakan mengenai tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan (Mulyani et al., 2018). Pada penelitian yang dilakukan (Krisna, 2019) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Fitri et al., 2018) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Leverage juga dapat mempengaruhi suatu perusahaan dalam praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Leverage atau solvabilitas Adalah rasio yang menunjukkan besarnya jumlah hutang yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai bisnis perusahaan tersebut. Ketika hutang perusahaan tinggi, menghasilkan tingkat bunga yang tinggi, dan ketika hutang tinggi perusahaan cenderung melakukan tidak melakukan penghindaran pajak sebaliknya jika perusahaan memiliki utang yang sangat sedikit, maka tingkat penghindaran pajak akan semakin tinggi. Leverage di dalam penelitian ini menggunakan debt to equity ratio (DER). Pada penelitian yang dilakukan (Alya & Yuniarwati, 2021) penelitian (Cahya Dewanti & Sujana, 2019) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Menurut (Alya and Yuniarwati, 2021), teori agensi merupakan teori yang membangun hubungan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) yang memberikan perintah dengan manajer sebagai pihak yang menjalankan perintah. Pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak untuk memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri dan tidak memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Untuk mengurangi perbedaan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang dari kepentingan principal. Prinsipal akan mengorbankan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh agen Teori agensi juga mengatakan bahwa principal akan mengorbankan sumber daya berupa kompensasi kepada agent agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan / kepentingan

Tax avoidance

Menurut Susan M (1996) Penghindaran pajak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan urusan pajak yang adil sehingga dapat mengurangi kewajiban pajaknya. Misalnya digunakan untuk menggambarkan penghindaran pajak dicapai oleh pribadi atau urusan bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah, ambiguitas, anomaly atau kekurangan lain dari hukum pajak

Tax avoidance adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah (loopholes) dari ketentuan perpajakan sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan itu sendiri. (Prasetyo & Pramuka, 2018).

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena tax avoidance adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penghindaran pajak yang diterapkan tersebut bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance). Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah (Oktavia et al., 2020)

Kepemilikan Institusional

Corporate governance dibentuk salah satunya untuk manajemen pajak. Tata kelola perusahaan digunakan untuk merealisasikan kepentingan jangka panjang stakeholder dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis yang baik. Corporate governance merupakan suatu sistem, proses dan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara manajer, pemilik, pemegang saham dan stakeholder lainnya yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola dan

mengendalikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemajuan usaha yang transparan dan akuntabilitas perusahaan yang menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya. (Prasetyo & Pramuka, 2018)

Perusahaan yang telah menerapkan good corporate governance tentu akan berdampak baik pada kegiatan operasionalnya dan kinerja perusahaan akan semakin efektif dan efisien bagi para stakeholders termasuk dalam penentuan kebijakan perpajakannya.

Husnan 2001 dalam (Prasetyo & Pramuka, 2018) menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling shareholders dan minority shareholders. Agency theory ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principle). Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan (asymmetric information). Sehingga konflik kepentingan antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principle) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (agency cost).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum, institusi keuangan, pemerintah, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014 dalam (Kurnianti, 2021)

Lim 2011 dalam (Prasetyo & Pramuka, 2018) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Kebijakan pajak yang dibuat perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya kepemilikan konstitusional. Semakin besar kepemilikan konstitusional akan mengurangi kebijakan tindakan pengurangan pajak, sebaliknya semakin kecil kepemilikan konstitusional akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak (Aprianto & Dwimulyani, 2019)

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan presentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan (direktur dan komisaris). Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana terjadi peran ganda antara manajer dan pemegang saham atau bisa disebut dengan seorang manajer perusahaan juga memiliki saham perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait aktifitas operasi perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih giat untuk kepentingan pemegang saham karena apabila terdapat keputusan yang salah, manajemen juga yang akan menanggung konsekuensinya (Arifani, 2012 dalam (Prasetyo & Pramuka, 2018). Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut Cristiawan dalam (Kalbuana et al., 2017) Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer.

Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan (Prasetyo & Pramuka, 2018). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki risiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. (Sumantri et al., 2018).

Dewan Komisaris Independen

Menurut UU PT No. 34 Tahun 2007 Komisaris adalah organ perseoran yang bertugas mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat pada direksi. Komisaris independen merupakan bagian dari Corporate governance.

Menurut Surya dan Yustiavandana (Prasetyo & Pramuka, 2018) dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan. Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan minimal 30% dari anggota dewan komisaris.

Komisaris independen sebagai pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain harus secara proaktif mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dan praktik Good corporate governance diterapkan dengan baik, mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku serta menerapkan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006).

Raharjo dan Daljono 2014 (Primasari, 2019) Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan manajemen perusahaan. Fungsi monitoring juga dilaksanakan oleh komisaris independen guna mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Selain itu, komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan perihal strategi atau kebijakan perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Dewi, 2019).

Pengawasan yang ketat dari komisaris independen dapat meminimalisir masalah keagenan dan pada akhirnya kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan dapat dikurangi. Fungsi dari komisaris independen adalah untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, disclosure, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara).

Leverage

Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) (Aprianto & Dwimulyani, 2019) leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage merupakan pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak eksternal melalui hutang, sehingga semakin besar penggunaan hutang maka semakin banyak pihak eksternal yang terlibat, yang dapat meningkatkan pengawasan terhadap pihak manajemen.

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan dan investasi perusahaan. Sehingga perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan beban bunga.

Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu pula bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio leverage berarti semakin tinggi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan semakin tinggi pula biaya beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. (Fitri et al., 2018)

H 1: Kepemilikan institusional diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

H 2: Kepemilikan manajerial diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

H 3: Dewan komisaris independen diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

H 4: Leverage diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

H 1: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

III. METODE

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasi yang diambil yaitu seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 sebanyak 47 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memenuhi kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Oleh karena itu peneliti menentukan kriteria dalam pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar secara terus menerus termasuk ke dalam perusahaan Pertambangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama Tahun 2016-2019.
2. Melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit selama 4 tahun berturut – turut dari tahun 2016-2019.
3. Perusahaan yang mengungkapkan GCG (*Good Corporate Governance*) secara lengkap dalam laporan tahunan (annual report) dan mengalami untung selama selama 4 tahun dari tahun 2016-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik data pengumpulan ini dilakukan dengan metode studi Pustaka dan dokumentasi yaitu dengan mencatat, mencari, mengutip secara langsung data yang diperlukan. Dengan teknik ini penulis mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2016 sampai 2019, mengenai variabel yang akan diteliti yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen, *Leverage* dan *Tax avoidance*.

Operasional Variable Penelitian

Variable Independent Pertama (X1)

Kepemilikan institusional diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar Djakman dan Machmud (2013) (Prasetyo & Pramuka, 2018)

Adapun perhitungannya sebagai berikut. Rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Sumber : Prasetyo & Pramuka, 2018

Variable Independent Kedua (X2)

kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dengan jumlah saham yang beredar (Arifani, 2012) (Prasetyo & Pramuka, 2018)

Adapun perhitungannya sebagai berikut. Rumus :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

Sumber : Prasetyo & Pramuka, 2018

Variable Independent Ketiga (X3)

Variabel dewan komisaris independen diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris. Arifani (2012) (Prasetyo & Pramuka, 2018)

Adapun perhitungannya sebagai berikut. Rumus :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Variable Independent Keempat (X4)

Leverage dimaksud di
Sumber : Prasetyo & Pramuka, 2018

asal dari eksternal berupa utang. Utang yang
ngan membagi seluruh total kewajiban dengan

ekuitas, dimana banyak perusahaan mendapatkan dana dari pihak luar sehingga perusahaan harus dapat melunasi

utang tersebut salah satunya dengan cara mengurangi beban pajak sehingga dapat di alokasikan kepada utang perusahaan. Hutang Perusahaan atau DER merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas.

Adapun perhitungannya sebagai berikut. Rumus :

$$\text{Debt To Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Sumber : Kartana & Wulandari, 2018

Variable Dependen (Y)

Variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*), dalam hal ini adalah *tax avoidance* (Y). Dalam hal ini *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR (*effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan (Mulyani et al., 2018).

Adapun perhitungannya sebagai berikut. Rumus :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Sumber : Prasetyo & Pramuka, 2018

Analisis Data dan Uji Hipotesis

Analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS 26 (Statistical Product and Service Solution 26). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dan analisis deskriptif. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang dijadikan sampel. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Statistik deskriptif adalah proses pengumpulan dan peringkasan data, serta upaya untuk menggambarkan hasil karakteristik yang penting pada data yang telah diorganisir tersebut. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan kemencengan distribusi (Ghozali, 2018)

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis maka model regresi diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepastian bahwa model regresi yang digunakan tidak ada masalah multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan data terdistribusi normal. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi *ordinary least square* (OLS) akan sesuai *best linear unbiased estimator* (BLUE) artinya model regresinya dapat digunakan sebagai alat estimasi penelitian (Ghozali, 2018)

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang dilakukan ada 4 yaitu uji normalitas, uji multikolienaritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

b. Uji Multikolinearitas

c. Uji Autokorelasi

d. Uji Heteroskedastisitas

1. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linear Berganda

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1\text{INST} + \beta_2\text{MANJ} + \beta_3\text{INDP} + \beta_4\text{DER} + \epsilon$$

Dimana:

ETR = *Tax avoidance* (ETR)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

INST = Kepemilikan Institusional

MANJ = Kepemilikan Manajerial

INDP = Komisaris Independen

DER = *Leverage*

€ = Error

- b. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R²)
2. Uji Hipotesis
 - a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
 - b. Uji Signifikan Parsial (Uji statistik t)

IV. PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa melalui cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul yang seharusnya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah kegiatan pengumpulan data, pengelompokan data, penentuan nilai dan fungsi statistik, serta pembuatan grafik, diagram dan gambar. Analisa statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran informasi mengenai jumlah sampel (N), Nilai rata-rata (Mean), Standar Deviasi, Nilai Maksimum dan Nilai Minimum. Pada penelitian ini analisis deskriptif menggunakan SPSS versi 26. Hasil uji Deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
INST	40	0,14	0,97	0,6860	0,29296
MANJ	40	0,00	0,98	0,1065	0,26245
INDP	40	0,14	0,67	0,3705	0,10513
<i>Leverage</i>	40	0,12	5,98	1,1630	1,41948
<i>Tax avoidance</i>	40	0,17	0,99	0,3506	0,17025
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam penelitian ini terdapat 40 sampel dari 10 perusahaan pada periode 2016-2019.

Variabel Dependen (Y) yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan ETR menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,3506 dengan standar deviasi 0,17025. Nilai terendah (minimum) sebesar 0,17 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 0,99. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu $0,17025 < 0,3506$ menunjukkan bahwa sebaran data untuk *tax avoidance* baik. Nilai ETR yang tinggi mengindikasikan semakin rendahnya penghindaran pajak perusahaan. Dilihat dari hasil nilai ETR menunjukkan nilai yang tinggi maka menandakan bahwa pihak manajemen perusahaan perusahaan sampel yang diteliti cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Variabel Independen (X1) yaitu kepemilikan institusional menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,6860 dengan standar deviasi 0,29296. Nilai terendah (minimum) sebesar 0,14 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 0,97. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu $0,29296 < 0,6860$ menunjukkan bahwa sebaran data kepemilikan institusional baik. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel kepemilikan institusional (INST) selama periode pengamatan.

Variabel Independen (X2) yaitu kepemilikan manajerial menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,1065 dengan standar deviasi 0,26245. Nilai terendah (minimum) sebesar 0,00 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 0,98. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu $0,26245 > 0,1065$ menunjukkan bahwa sebaran data

kepemilikan institusional tidak baik. Standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingginya simpangan data variabel kepemilikan manajerial (MANJ) selama periode pengamatan.

Variabel Independen (X3) yaitu dewan komisaris independen nilai rata-rata sebesar 0,3705 dengan standar deviasi 0,10513. Nilai terendah (minimum) sebesar 0.14 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 0,67. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yaitu $0,10513 < 0.3705$ menunjukkan bahwa sebaran data dewan komisaris independen baik. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya simpangan data variabel dewan komisaris independen (INDP) selama periode pengamatan.

Variabel Independen (X4) yaitu *leverage* nilai rata-rata sebesar 1,1630 dengan standar deviasi 1,41948. Nilai terendah (minimum) sebesar 0.12 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 4,34. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu $1,41948 > 1,1630$ menunjukkan bahwa sebaran data *leverage* tidak baik. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingginya simpangan data variabel *leverage* (DER). selama periode pengamatan. Dari hasil diatas, nilai DER menunjukkan nilai yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian perusahaan sampel dibiayai oleh utang.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov test* atau analisis statistik.

Uji normalitas menggunakan uji statistik yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Data dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki nilai *Asymp. sig.(2-tailed)* lebih besar dari 5%. Sebaliknya, apabila nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka data dikatakan tidak terdistribusi normal. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel IV.9 sebagai berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,10058092
Most Extreme Differences	Absolute	0,134
	Positive	0,134
	Negative	-0,063
Test Statistic		0,134
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070 ^c

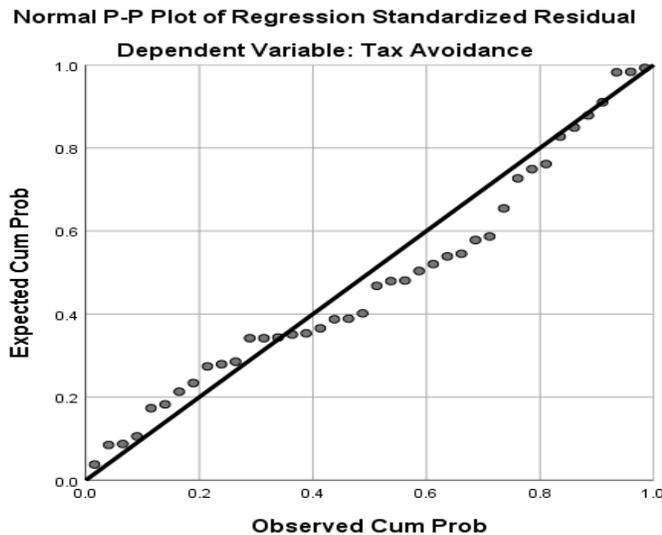
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Pada gambar one-sample Kolmogorov-Smirnov nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* menunjukkan angka 0,070. Angka ini lebih besar dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

Dilihat melalui normal probability plot yang penyebaran titik-titik variabelnya seharusnya berada tidak jauh disekitar garis $Y=X$ dan histogram yang membentuk kurva normal (normal curve). Adapun grafiknya dapat dilihat pada gambar IV.1 sebagai berikut.

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Grafik P Plot



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Pada grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa modal regresi memenuhi asumsi normalitas, atau resedus dari model dapat dianggap berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variable independent dalam model regresi. Untuk mengetahuinya dapt dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai batas yang digunakan adalah *tolerance* > 0,10. Berikut adalah hasil uji multikolonieritas dapat dilihat dalam tabel IV.10 sebagai berikut.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Toleranc e	VIF
1	(Constant)		
	INST	0,490	2,039
	MANJ	0,550	1,818
	INDP	0,804	1,243
	<i>Leverage</i>	0,704	1,420

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Nilai VIF untuk variable kepemilikan institusional bernilai 2,039 dengan *tolerance* sebesar 0,490, nilai VIF untuk variable kepemilikan manajerial bernilai 1,818 dengan *tolerance* sebesar 0,550, nilai VIF untuk variable dewan komisaris independent 1,243 dengan *tolerance* sebesar 0,804 dan nilai VIF untuk variable *leverage* yang diukur dengan menggunakan (DER) bernilai bernilai 1,243 dengan *tolerance* sebesar 0,704. Dengan demikian hasil tersebut diketahui variabel independent yaitu variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independent dalam model regresi sehingga persamaan regresi ini layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pda periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam

penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan, jika nilai DW berada antara -2 dan +2 Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel IV.11 sebagai berikut .

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,10617	1,297

a. Predictors: (Constant), *Leverage*, MANJ, INDP, INST

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

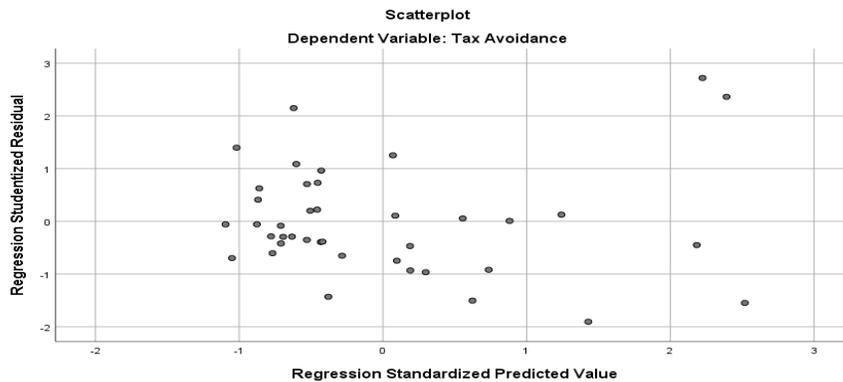
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil nilai uji durbinwatson sebesar 1,297, nilai ini diantara -2 sampai +2 atau $-2 < 1,297 < +2$. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* (DER) terhadap *tax avoidance*.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu bertujuan untuk mengunji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara variabel dependen (SRESID) dan variabel indenpenden (ZPRED). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola dari grafik *scatterplot* dan titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. berikut adalah gambar IV.2 adalah sebagai berikut.

Gambar 2 Hasil Uji Hetetoskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan gambar diatas, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik baik di atas maupun di bawah angka 0 dan sumbu Y, tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kata lain terjadi homokedastisitas pada model regresi.

3. Uji Statistik

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen yaitu CGG dalam hal ini hanya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris independen dan *leverage* terhadap variable dependen Praktik Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel IV.12 sebagai berikut.

Tabel 5 Hasil analisis regresi linear berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,803	0,173		4,632	0,000
	INST	-0,197	0,115	-0,339	-	0,095

					1,714	
	MANJ	-0,190	0,083	-0,430	- 2,300	0,028
	INDP	-0,215	0,225	-0,148	- 0,955	0,346
	Leverage	0,105	0,037	0,472	2,856	0,007

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda untuk penelitian ini, yaitu :

$$ETR = 0,803 - 0,197 INST - 0,190 MANJ - 0,215 INDP + 0,105 DER + \epsilon$$

1. Nilai koefisien Konstanta (α)

Nilai koefisien untuk konstanta sebesar 0,803, nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent, *leverage* (DER) bernilai 0 maka variabel dependen *tax avoidance* bernilai 0,803.

2. Nilai koefisien kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar -0,197, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa apabila kepemilikan institusional mengalami peningkatan 1 satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,197. Sedangkan sisanya -0,803 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. Nilai koefisien kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*

Nilai koefisien kepemilikan manajerial sebesar -0,190, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa apabila kepemilikan manajerial mengalami peningkatan 1 satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,190. Sedangkan sisanya -0,810 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4. Nilai koefisien dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Nilai koefisien dewan komisaris independen sebesar -0,215, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa apabila dewan komisaris independent mengalami peningkatan 1 satuan maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar -0,215. Sedangkan sisanya -0,785 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Nilai koefisien *leverage* terhadap *tax avoidance*

Nilai koefisien *leverage* sebesar 0,105, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa apabila *Leverage* (DER) mengalami peningkatan 1 satuan maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan sebesar 0,105. Sedangkan sisanya 0,895 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji Koefisien Determinan (Adjusted R²)

Pengujian koefisien determinasi yaitu bertujuan untuk melihat seberapa besar variabel 716ndependent berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menggunakan SPSS versi 26 didapatkan nilai adjusted R2 yang tertera dalam tabel IV.12 sebagai berikut

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.573 ^a	0,328	0,251	0,10617	1,297

a. Predictors: (Constant), *Leverage*, MANJ, INDP, INST

b. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai adjusted R-square (R2) sebesar 0.251 nilai tersebut diartikan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* hanya mampu menjelaskan 25,1% terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Dimana nilai R2 ini mendekati 0 yang menunjukkan kemampuan variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* dalam menjelaskan variabel dependen yaitu *tax avoidance* amat terbatas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji Signifikan Simultan (Uji F) adalah Uji statistic F yang digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama (Simultan) terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan (Uji Statistik F) dapat dilihat pada tabel IV.13 sebagai berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji Simultan F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,193	4	0,048	4,270	.006 ^b
	Residual	0,395	35	0,011		
	Total	0,587	39			

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

b. Predictors: (Constant), *Leverage*, MANJ, INDP, INST

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* memiliki nilai *f* tabel yaitu 2,45 menunjukkan *f* hitung > *t* tabel yaitu 4,270 < 2,45 dan nilai Sig 0.006 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. dengan Sig < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan dengan ETR.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, pengaruh variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independent dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel IV.14 sebagai berikut.

Tabel 8 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji statistik t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,803	0,173		4,632	0,000
	INST	-0,197	0,115	-0,339	-1,714	0,095
	MANJ	-0,190	0,083	-0,430	-2,300	0,028
	INDP	-0,215	0,225	-0,148	-0,955	0,346
	<i>Leverage</i>	0,105	0,037	0,472	2,856	0,007

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui kesimpulan hipotesis sebagai berikut.

a. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian variable kepemilikan institusional memiliki nilai *t* tabel yaitu 2,03011 menunjukkan *t* hitung < *t* tabel yaitu -1,714 < 2,03011 dan tingkat signifikansi sebesar 0,095 > 0,05, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

b. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian variable kepemilikan manajerial memiliki memiliki memiliki nilai t tabel yaitu 2,03011 menunjukkan t hitung > t tabel yaitu 2,300 > 2,03011 dan tingkat signifikansi sebesar 0,028 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

c. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian variable dewan komisaris independen memiliki memiliki memiliki nilai t tabel yaitu 2,03011 menunjukkan t hitung < t tabel yaitu -0,995 < 2,03011 dan tingkat signifikansi sebesar 0,346 > 0,05, menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian (H3) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

d. Pengaruh Leverage terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian variable leverage memiliki nilai t tabel yaitu 2, 03011 menunjukkan t hitung > t tabel yaitu 2,856 < 2,03011 dan tingkat signifikansi sebesar 0,007 < 0,05, menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian (H4) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, & Yuniarwati. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 136–145. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.288>
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Sales Growth dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, November.
- Cahya Dewanti, I. G. A. D., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012–2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Fitri, W. A., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2018). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *J u m a U N S E R A*, 20–30.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.2139/ssrn.94043>
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, dan Tingkat Pajak Efektif terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Magistra*, 100, 26–35.
- Kurnianti, D. (2021). PROFITABILITAS, CSR, CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2014 - 2018. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia*, 12(1), 6.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh. (2018). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. agus. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 20(2). <https://doi.org/10.32616/jbr.v1i2.64>

- Primasari, N. H. (2019). LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PENJUALAN, PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE (studi emperis pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 198.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (C. Alfabeta (ed.)).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sumantri, F. A., Anggraeni, R. D., & Kusnawan, A. (2018). Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *ECo-Buss*, 1(2), 116–120.
- V.Wiratna, S. (2015). *Metodologi penelitian bisnis ekonomi*. Pustaka Baru 2015.
- <https://www.suara.com/bisnis/2015/10/19/043000/pemerintah-didesak-transparan-soal-pajak-tambang?page=all>
diakses : 20 Maret 2021
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> diakses : 05 Maret 2021